

# KORUPSI DAN PEMBANGUNAN

Hermanto

## Abstrak

*Korupsi masih menjadi penyakit kronis (bahkan laten) bagi bangsa Indonesia hingga detik ini. Meskipun reformasi sudah mulai berjalan sejak tahun 1998 yang lalu dengan ditandai adanya pergantian kepemimpinan nasional, namun pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. Proses pembangunan (ekonomi) yang dimulai sejak Orde Baru ternyata tidak disertai dengan pembangunan institusional dan politik. Hal itu bisa dilihat dari minimnya partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Tulisan ini akan mengkaji masalah korupsi dikaitkan dengan pembangunan yang dilakukan. Bagaimana pembangunan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi secara signifikan? Apakah desentralisasi (otonomi daerah) dapat menjadi salah satu strategi yang dapat diandalkan?*

*Kata kunci: korupsi, kebijakan publik, pembangunan, desentralisasi*

## PENDAHULUAN

Suatu negara yang efektif dapat memberi kontribusi yang besar pada pembangunan ber-kelanjutan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Tapi tidak ada jaminan bahwa intervensi negara pasti akan memberi manfaat pada atau menguntungkan masyarakat.

Monopoli negara dalam paksaan, yang memberinya kekuatan untuk intervensi secara efektif dalam aktivitas ekonomi, juga memberinya kekuatan untuk bertindak arbitrer. Kemungkinan untuk mencari rent (*rent-seeking*) dan korupsi adalah sangat besar. Negara-negara harus bekerja untuk membentuk mekanisme yang memberi pejabat negara suatu

fleksibilitas dan insentif untuk bertindak hal yang baik, sementara itu juga melarang perilaku arbitrer, *rent-seeking* dan korupsi dalam berhubungan dengan pengusaha dan masyarakat.

## CHECK AND BALANCES SECARA FORMAL

Membasmi penyalahgunaan kekuasaan negara adalah tantangan bagi semua negara. Penyalahgunaan kekuasaan menciptakan masalah yang serius tentang kredibilitas. Tapi tindakan negara yang arbitrer dan sewenang-wenang meruntuhkan kewibawaan negara lebih besar daripada kredibilitas. Hal ini mengurangi upaya penegakan hukum,

dengan memperlemah kekuatan aturan hukum apapun juga yang dibentuk di negara itu. Hal tersebut akan menciptakan kondisi yang membuat para pejabat negara untuk menempatkan mereka di atas hukum dan demikian pula pada sebagian masyarakat. Pembangunan dalam lingkungan yang seperti itu bagaikan menghantam tembok yang keras.

### **Instrumen Pemberantasan**

Pembangunan yang berkelanjutan, secara umum merupakan mekanisme formal pembasmian yang membuat negara dan pegawai negara bertanggung jawab pada tindakannya. Agar berlangsung lama dan menjadi dapat dipercaya, mekanisme ini harus disandarkan pada institusi pusat negara; namun jika ia terlalu lemah, mekanisme eksternal seperti pengadilan internasional mungkin dapat menggantinya sementara. Dua mekanisme formal pembasmian yang kuat adalah independensi pengadilan (hukum) dan pemisahan kekuasaan.

#### **□ Independensi pengadilan**

Pengadilan dapat memainkan peranannya secara baik hanya jika ada 3 kondisi, yaitu independensi, kekuatan untuk menegakkan aturan dan organisasi yang efisien. Independensi dari bagian pemerintah lainnya adalah paling penting.

Apapun sifat pengadilan dalam hubungannya dengan legislatif dan eksekutif, semua negara industri--dan banyak negara

berkembang---mempercayakan pada pengadilan untuk menangani tanggung jawab eksekutif di bawah hukum dan untuk menginterpretasikan dan menegakkan konstitusi.

Efektifitas pengadilan (hukum) tergantung pada penegakan keputusan yang diambilnya. Dalam praktek, hal ini berarti bahwa bagian lain dari pemerintah harus berkonsentrasi untuk menyediakan sarana yang diperlukan bagi penegakan itu.

Di banyak negara kapabilitas penegakan merupakan hambatan. Membangun hubungan antara yudikatif, legislatif dan eksekutif yang menjamin independensi pengadilan dan penegakan hukum yang amil adalah suatu proses gradual.

#### **□ Pemisahan kekuasaan**

Pengadilan mungkin mampu dalam menegakkan aturan, tapi jika masyarakat tidak mendukungnya memper-tahankan kestabilan, maka kredibilitas pemerintah masih belum kuat. Mekanisme konstitusional klasik untuk melarang perubahan legislatif yang konstan adalah pemisahan kekuasaan secara horisontal dan vertikal. Kekuasaan dapat dipisah secara horisontal antara yudikatif, legislatif dan eksekutif. Sedangkan secara vertikal antara pemerintah pusat dengan lokal.

Pemisahan kekuasaan akan meningkatkan kepercayaan diri pada stabilitas aturan. Banyak negara berkembang, termasuk beberapa yang memisahkan kekuasaan secara formal, mempunyai mekanisme *check and balances* yang agak efektif pada tindakan para pemimpin politik.

Di beberapa negara, legislatif adalah lemah karena kapasitas yang kurang dan informasi yang tidak memadai. Di lain pihak, eksekutif mendominasi legislatif yang selalu kalah. Tapi, seperti menciptakan sistem pengadilan yang berfungsi dengan baik, elaborasi *check and balance* yang konstitusional secara formal, maupun menciptakan institusi yang lebih efektif merupakan suatu proses gradual.

#### □ *Mekanisme eksternal*

Dalam beberapa hal, pelarangan ekstrateritorial dan internasional dapat menggantikan keterbatasan kemampuan institusi nasional untuk menegakkan aturan hukum atau untuk memberi sinyal yang dapat dipercaya bahwa aturan hukum akan ditegakkan. Misalnya, adanya IMF dan Bank Dunia untuk bantuan luar negeri bagi pembangunan, ataupun WTO, NAFTA atau AFTA dan lainnya untuk perdagangan.

#### Membangun dalam Fleksibilitas

Instrumen pelarangan dan pembasmian adalah dasar yang penting untuk pembangunan

berkelanjutan. Tapi, pelarangan yang berlebih-lebihan (*excessive*) dapat mengarah kepada kemandegan atau kelumpuhan aktivitas (*paralysis*). Instrumen bagi pelarangan pemerintah diperlukan untuk dilengkapi dengan susunan institusional yang membangun dalam fleksibilitas pada eksekutif dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan beradaptasi pada informasi baru dan perubahan lingkungan.

#### MENGAWASI KORUPSI

Korupsi didefinisikan dalam banyak cara, tapi World Bank mendefinisikannya sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (*World Development Report, 1997*). Definisi itu senada dengan Shleifer dan Vishny (1993) yang menyatakan bahwa korupsi (pemerintah) sebagai penjualan hak milik pemerintah oleh pegawai pemerintah untuk keuntungan pribadi. Meskipun korupsi cenderung untuk memperoleh perhatian utama, ia merupakan masalah umum yang disebabkan oleh insentif dari pelayanan publik. Korupsi berkembang ketika ada distorsi dalam kebijakan dan peraturan, regim yang berkuasa menyediakannya dan lemahnya lembaga yang seharusnya melarang dan membasmi.

Masalah korupsi terletak pada *intersection* dari kepentingan publik dan pribadi. Hal ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu: (1) kepentingan pribadi, baik domestik

maupun eksternal, mempengaruhi untuk mengambil keuntungan dari adanya kesempatan untuk korupsi dan rent-seeking, dan (2) institusi publik mengalah pada kepentingan pribadi itu dan sumber korupsi lainnya karena tidak adanya pelarangan yang dapat diandalkan dan dipercaya.

### Penyebab korupsi

Rangsangan untuk perilaku korupsi meningkat selama pegawai negara mempunyai keleluasaan yang besar dan tanggung jawab yang kecil. Politisi, birokrat, dan hakim seharusnya mengawasi. Pegawai negara menggunakan posisinya untuk menguntungkan pribadi dengan menerima suap dari mereka yang mau untuk membuat pembayaran ilegal (fiktif) agar memperoleh apa yang mereka inginkan dari pemerintah.

Lebih lauh, korupsi dan rent-seeking akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hingga saat ini, studi para ekonom tentang korupsi masih sangat terbatas.<sup>1</sup> Penelitian tentang kaitan antara korupsi dengan pertumbuhan (dan investasi) dilakukan oleh Paulo Mauro (1995). Ia menemukan bahwa korupsi menurunkan investasi swasta, dengan demikian mengurangi

pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang negatif antara korupsi dan investasi (yang sama besarnya dengan pertumbuhan), adalah signifikan baik secara statistik maupun secara ekonomis.<sup>2</sup>

Murphy, Shleifer dan Vishny (1993) mengemukakan dua alasan mengapa *rent-seeking* dan korupsi terlalu mahal bagi pertumbuhan (dan pembangunan)<sup>3</sup>, yaitu:

1. Aktivitas *rent-seeking* meningkatkan *returns*. Jadi, peningkatan aktivitas *rent-seeking* akan membuat lebih menarik daripada aktivitas produktif. Kondisi ini dapat memacu pada keseimbangan dalam perekonomian, dengan tingkat *rent-seeking* yang sangat tinggi dan output yang rendah.
2. *Rent-seeking*, terutama public *rent-seeking* oleh pejabat pemerintah, sangat memperparah aktivitas yang inovatif

<sup>1</sup> Mauro memberi contoh di Bangladesh yang memperbaiki integritas dan efisiensi birokrasi pada level yang dimiliki Uruguay (yang relatif efisien bagi negara berkembang), rata-rata laju estasinya akan meningkat hampir 5%, dan rata-rata pertumbuhan PDB per tahun akan meningkat di atas 50%.

<sup>2</sup> Murphy, Shleifer dan Vishny (1993) juga membuktikan bahwa negara-negara yang berisikan orang-orang sangat ingin melakukan aktivitas *rent-seeking* cenderung untuk tumbuh lebih lambat. Studi sebelumnya, Shleifer dan Vishny (1991) juga menemukan bahwa korupsi akan cenderung untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi, serta Rose-Ackerman (1978) mengingatkan adanya kesulitan membatasi korupsi pada area tertentu yang secara ekonomis dapat ditoleransi.

<sup>1</sup> Beberapa studi itu adalah studi oleh Becker dan Stigler (1974), kemudian Banfield (1975), Rose-Ackerman (1975, 1978) dan Klitgaard (1988, 1991). Mereka memfokuskan pada model korupsi tentang hubungan antara "prinsipal" (pejabat pemerintah) dengan "agen" (pegawai pemerintah biasa), yang menarik suap dari para pihak swasta (institusi maupun pribadi).

daripada aktivitas produksi tiap hari.

### Mengurangi korupsi

Banyak negara telah berusaha untuk mengurangi korupsi yang endemik. Korupsi tidak dapat dibasmi secara efektif dengan mengisolasi dari masalah lainnya. Ia membutuhkan strategi yang *multi-pronged*. Salah satunya adalah difokuskan pada menciptakan birokrasi yang berdasarkan aturan hukum (*rule-based*) dengan struktur gaji pada pegawai negara yang layak, rekrutmen dan promosi yang berdasarkan kemampuan dan jasa (*merit-based*) untuk melindungi dari patronase politis, dan pengendalian korups yang *credible* untuk mencegah penggunaan sumberdaya publik yang arbitrer.

Dalam hal ini difokuskan pada 2 strategi, yaitu (1) untuk mengurangi kesempatan pegawai negara melakukan korupsi, dan (2) meningkatkan mekanisme monitoring dan hukuman--tidak hanya menggunakan hukuman kriminal tapi juga dengan institusi formal dan warga negara biasa.

Masalah korupsi ini dapat dilihat lebih dekat ke negara Indonesia sebagai contoh salah satu negara paling korup di dunia. Pada masa transisi ini, bagi Indonesia merupakan momentum yang tepat guna memperbaiki peranan negara yang disesuaikan dengan kapabilitasnya dan juga guna memperkuat lembaga negara.

Reformasi yang sedang berproses merupakan suatu bentuk perbaikan itu. Birokrasi pemerintah Indonesia sudah terkenal tidak efisien dan tidak efektif. Laporan *Transparency International* yang terbit tiap tahun hampir selalu menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia. Peringkat itu tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Paulo Mauro (1995), *World Economic Forum* (1999) dan *Political and Economic Risk Consultancy* (1999) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia maupun di Asia..

### DESENTRALISASI

Masyarakat adalah makna sekaligus sasaran pembangunan. Tetapi mereka mempunyai kekuatan dan sumberdaya yang berbeda, serta kepentingan yang berbeda, di mana kesemuanya itu pemerintah harus berusaha untuk meresponnya secara efektif.

Pemerintahan yang mengabaikan kebutuhan bagian besar dari masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan bukanlah pemerintah yang *capable*. Dan bahkan dengan kemauannya, pemerintah tidak memenuhi kebutuhan secara kolektif jika tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan.

Memperkuat lembaga negara harus dimulai dengan membawa pemerintah makin dekat dengan masyarakat. Ini berarti membawa suara rakyat ke dalam pembuatan

kebijakan, yaitu membuka jalan bagi rakyat secara individu, organisasi swasta, dan kelompok lainnya dalam masyarakat untuk menyampaikan suaranya. Dengan kata lain yang lebih tepat, hal ini juga berarti desentralisasi kekuasaan dan sumberdaya pemerintah.

### Memperbesar *Accountability* dan Responsivitas

Saat ini, dengan makin luasnya pendidikan dan informasi dan tumbuhnya pluralisme antar bangsa dapat menciptakan tekanan baru pada pemerintah untuk mendengarkan dan merespon suara rakyatnya. Mampukah pemerintah melakukannya? Satu contoh yang terjadi menyatakan bahwa pemerintah tetap solid, tetapi kinerja dari beberapa lembaga negara menurun dari yang diharapkan.

Oleh karena itu memperbesar tanggung jawab dan responsivitas melalui partisipasi dapat dilakukan dengan cara:

#### □ *Electoral participation (partisipasi dalam pemilu)*

Dalam masyarakat demokratis, pemilu adalah manifestasi utama dari suara rakyat. Jumlah pemerintahan yang dipilih secara demokratis telah meningkat tajam dalam dekade ini, memberikan kepada warga negara suatu kesempatan baru untuk menyuarakan opini mereka. Pada tahun 1974, hanya 39 negara--atau 1/4 dari negara yang ada di dunia--yang demokratis. Sekarang, 117 negara--hampir 2/3

dari negara-negara di dunia--menggunakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin nasional mereka, dan 2/3 dari masyarakat dewasa di negara berkembang yang layak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Prinsip *one person one vote* adalah sangat mendasar bagi tujuan pemilu. Tanpa pengamanan yang memadai, intervensi secara politis dan kecurangan pemilu dapat berpengaruh secara serius terhadap lembaga perwakilan dan legitimasi hasil pemilu.

#### □ *Keragaman dan perwakilan*

Efek dari aturan mayoritas kadang-kadang mendorong untuk mengubah tata cara pemilu yang menjamin perwakilan kelompok minoritas yang memadai. Seperti jumlah konflik etnis, keyakinan dari kelompok tertentu bahwa mereka tertinggal (dalam hal pendapatan, kekayaan atau pekerjaan) dapat menjadi sumber frustrasi yang besar. Hal ini dapat memperparah konflik langsung jika kelompok itu kekurangan arti perwakilannya. Elite politik yang melihat perbedaan etnis dalam persaingan kekuasaan dan distribusi patronase akan menambah panas yang akhirnya menjadi pertikaian.

Perbedaan etnis dan konflik adalah bagian dari masyarakat, di mana beberapa masyarakat penanganannya lebih baik dibanding lainnya. Untuk mengurangi konflik seperti itu, harus dilakukan penyebaran titik-titik kekuasaan atau *points of power* (desentralisasi atau

*devolution*), mendorong tata cara pemilu yang meningkatkan kerjasama antar kelompok etnis (insentif pemilu dan koalisi), dan membuka kesempatan yang sama bagi kelompok minoritas untuk bekerja sektor publik dan sektor lainnya.

#### □ *Alternatif pemberian suara dan partisipasi*

Aturan pemungutan suara dan insentif pemilu dapat direformasi untuk membuatnya lebih representatif, tapi kenyataan yang ada bahwa pemilu dan referendum diselenggarakan relatif tidak terlalu sering (kecuali Swiss dengan rata-rata referendum 5 lokal diadakan tiap tahun sejak 1945) membatasi peluangnya untuk mengkomunikasikan informasi tentang preferensi kemasyarakatan. Di banyak masyarakat, demokratis atau tidak, warga negara mencari perwakilan kepentingannya, seperti pembayar pajak, pengguna jasa publik serta klien atau anggota LSM maupun asosiasi sukarela lainnya.

Pertumbuhan LSM yang sangat cepat menggambarkan kecenderungan yang sangat gamblang. Sejak akhir 1980-an, jumlah LSM yang beroperasi di Afrika dan Asia tumbuh hampir dua kali lipat. Di Eropa dan Eropa Timur serta CIS, jumlah LSM naik hampir 3 atau 4 kali lipat dibandingkan tahun 1989. Di beberapa negara OECD, pengeluaran di sektor LSM terhitung hampir 4% dari GDP. Di banyak negara berkembang, LSM bertugas dalam pelayanan jasa yang berskala

kecil, bekerja di masyarakat dan di mana pemerintah atau swasta tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Dan yang menjadi kecenderungan akhir-akhir ini, ketika kredibilitas pemerintah dan lembaga negara lainnya menurun, maka alternatif pemberian suara atau opini dan perwakilan ditujukan kepada LSM-LSM itu.

#### Memperbaiki Kapabilitas Institusional

Meningkatkan kesempatan untuk menyampaikan suara dan partisipasi dapat memperbaiki kapabilitas pemerintah melalui 3 cara, yaitu:

- Ketika masyarakat dapat mengekspresikan opini mereka, secara formal maupun informal, dan tidak buta hukum, pemerintah belajar beberapa hal tentang kredibilitas yang dibutuhkan untuk dapat memerintah dengan baik.
- Di mana ada masalah dan kapabilitas pemerintah yang lemah membentuk pelayanan publik yang inefisien, maka kelompok pengguna dan asosiasi masyarakat dapat memberi informasi kepada pegawai negara tentang masalah itu dan menekannya untuk memperbaikinya.
- Tidak masalah bagaimana dedikasinya, bekerja keras, atau pegawai negara yang giat, mereka tidak dapat mengantisipasi semua barang dan jasa publik yang diinginkan masyarakat.

Munculnya organisasi swasta dan LSM merupakan alternatif yang dapat membantu untuk menemukan antara permintaan dan penawaran barang publik.

Tidak ada acuan (*blueprint*) untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara suara rakyat, partisipasi dan pengawasan birokrasi tentang ketentuan barang-barang publik. Solusinya tergantung pada kapabilitas pegawai negara dan penyedia barang publik lainnya.

Dalam manajemen sumber daya milik umum, produksi infrastruktur dasar, dan pelayanan jasa pokok, adalah sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam membuat maupun mengimple-mentasikan kebijakan. Hal ini bisa dilakukan melalui:

- Mekanisme partisipatif, hal ini bisa dilakukan dengan: (1) mekanisme untuk menginformasikan dan konsultasi, (2) mekanisme dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan.
- Membuat partisipasi yang berhasil membutuhkan kerja keras, hal ini menggambarkan bahwa dalam ketentuan barang publik lokal tertentu atau jasa yang didistribusikan--di mana masyarakat yang membayar juga penerima manfaat langsung--menggunakan kapasitas insitutional yang paling dekat dengan klien dapat memperbaiki kualitas dan efektifitas tindakan publik. Pemerintah yang *capable* akan memperkuat dan meningkatkan

efisiensi organ-isasi dan asosiasi lokal daripada menggantinya.

- Menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana pemerintah juga dapat mendorong partisipasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya dalam lingkungan yang kondusif. Pemerintah mempunyai kekuatan untuk memfasilitasi par-tisipasi dengan menjamin hak masyarakat untuk berorganisasi, memperoleh akses atas in-formasi sebaik-baiknya, untuk mengelola perjanjian bisnis secara sehat, dan untuk memiliki dan mengelola kekayaan.

## KESIMPULAN

Tekanan untuk melakukan reformasi meningkat di mana-mana. Pengusaha dan perusahaan swasta menginginkan kredibilitas tindakan negara dengan sistem yang berfungsi dengan baik. Warga negara meminta negara lebih responsif dan efektif dalam hal pelayanan umum dan kejujuran lebih besar dalam penggunaan sumberdaya publik.

Sementara itu, globalisasi meningkatkan permintaan untuk suatu negara yang lebih cerdas, salah satunya yang dapat merespon perubahan keadaan secara cepat. Tekanan ini mempunyai dilema: bagaimana untuk mengevaluasi pengambilan keputusan arbitrer tanpa membangun rigiditas yang menghambat inovasi dan perubahan.

Pemerintah di negara-negara berkembang telah mendemonstrasikan ketidak-seimbangan yang jelas antara

fleksibilitas dan larangan. Mereka secara umum tidak *credible*, bertanggung jawab, responsif maupun cerdas. Pemerintah dengan terlalu besar fleksibilitas dan tidak cukup pelarangan akan menemukan bahwa tindakan mereka tidak dipandang *credible*, serta investasi dan pertumbuhan akan terganggu. Negara seperti ini perlu untuk memperkuat instrumen pelarangan formal--seperti pengadilan yang independen, pemisahan kekuasaan yang efektif--untuk meningkatkan kredibilitas dan *accountability* pemerintah. Mekanisme komitmen internasional dapat menjadi pengganti jangka pendek ketika institusi sedang dibangun.

Tindakan tersebut belum cukup untuk menghentikan penyakit di negara berupa korupsi yang endemik dan mengakar yang telah merusak fungsi vital pemerintah. Memperkuat instrumen pelarangan yang formal hanya merupakan salah satu elemen dari strategi yang *multi-pronged* untuk mengawasi korupsi. Mereformasi pelayanan

umum (misalnya, dengan menaikkan gaji dan melarang patronase politis dalam rekrutmen dan promosi), mengurangi kesempatan para pegawai negara untuk bertindak korupsi (misalnya, dengan meningkatkan persaingan dan mengurangi keleluasaan dan otoritas pegawai negara), dan meningkatkan rasa tanggung jawab (*accountability*) adalah langkah penting yang lain.

Memperkuat mekanisme untuk monitoring dan *punishment*--atas orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap-- akan memerlukan penegakan hukum kriminal yang lebih giat. Tapi hal ini juga memerlukan pengawasan oleh institusi formal seperti *statutory board* maupun warga negara biasa (melalui pemungutan suara dan partisipasi). Usaha ini dapat membantu tidak hanya mengawasi dan mengendalikan korupsi tapi juga memperbaiki banyak fungsi pemerintah lainnya, seperti pengambilan kebijakan dan pelayanan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardhan, Pranab, (1997), "Corruption and Development: A Review of Issues", *Journal of Economic Literature* Vol. XXXV, September, pp. 1320-1346.
- Krueger, Anne O., (1974) "The Political Economy of the Rent-Seeking Society", *American Economic Review* Vol. 64 (3), June, pp. 291-303.
- Krueger, Anne O., (1995), "Policy Lessons from Development Experience Since World War", *Handbook of Development Economics, Vol. III* (edited by J. Behrman and T.N. Srinivasan), Elsevier Science B.V., pp. 2498-2550.
- Mauro, Paulo, (1995), "Corruption and Growth", *Quarterly Journal of Economics* Vol. CX (3), August, pp. 681-712.
- Murphy, Kevin M., Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W., (1993), "Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?", *American Economic Review* Vol. 83 (2), May, pp. 409-414.
- Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W., (1993), "Corruption", *Quarterly Journal of Economics* Vol. CVIII (3), August, pp. 599-617.
- World Bank, (1997), *World Development Report 1997*, Oxford University Press.
- Kompas, 17 Juni 1998.
- Kompas, 2 Mei 1999.
- Republika, 18 Mei 1999.